KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Ternate
Telepon 0921-3122119 – 31328194 faksimile 0921-3122118
Website : www.malut.kemenkumham.go.id Email : humas.malut@kemenkumham.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA TRIWULAN I

A. Pendahuluan

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2020 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang menekankan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), skor B atas SAKIP, dan persentase penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik seiring dengan ditetapkannya Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Birokrasi yang efektif dan efisien, diwujudkan melalui penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan visi reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia (world class bureaucracy). Perbaikan reformasi birokrasi di level instansi juga semakin meningkat yang tercermin dari semakin membaiknya nilai Indeks RB yang didukung dengan penetapan PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS, PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK dan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu dari sisi penataan kelembagaan, birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan 21 Lembaga Non Struktural (LNS) dibubarkan, 2 diintegrasikan, serta 1 disempurnakan. Dari sisi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negera (ASN) telah dikembangkan Talent Management sebagai bagian dari penguatan kompetensi, profesionalitas, dan daya saing nasional.

Perbaikan kualitas pelayanan publik terlihat dengan penerapan digitalisasi pelayanan publik (e-Services), peningkatan tingkat kepatuhan atas standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, integrasi sistem pengaduan masyarakat (LAPOR!-SP4N), serta pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM R.I dimulai sejak tahun 2012. Dan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM yang telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan, tentunya harus menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk terus bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan pada nilai **profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparan, integritas dan pelayanan**.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Manajemen Perubahan.

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah; dan
3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Adapun capaian reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada triwulan I tahun 2020 pada area manajemen perubahan adalah:

- **Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun pada tahun 2020 sudah dilaksanakan Rapat pembentukan Tim RB Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan melakukan penyusunan Tim RB Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

- **Pelaksanaan Kegiatan Apel Pagi dan Sore**

Ini sebagai Komitmen dan Disiplin Pegawai/ASN merupakan salah satu unsur suksesnya sebuah organisasi pada perkantoran, dan sebagai landasan awal yang kuat pada aspek Komitmen dan Disiplin Pegawai akan memudahkan di dalam penanaman visi, misi dan sasaran suatu organisasi sehingga prasentase pencapaian target – target kinerja dapat lebih optimal.

Untuk mengimplementasikan Komitmen dan Disiplin Pegawai tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menerapkan langkah dengan melakukan pelaksanaan Apel Pagi dan Sore setiap hari yang melibatkan

seluruh ASN yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara dan Berdoa bersama demi kelancaran tugas, juga menjadi salah satu agenda yang wajib di lakukan dalam kegiatan apel pagi setiap harinya.

- **Pelaksanaan Coaching dan mentoring**

Pelaksanaan Coaching dan mentoring merupakan salah satu hal penting dalam membentuk dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Kantor Wilayah Maluku Utara.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Program penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencapai peraturan/regulasi yang harmonis dan sinkron sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan melalui penataan peraturan perundang undangan dan melakukan pengembangan dan pendampingan Hukum.

Keberhasilan dari program/kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan ini akan diukur berdasarkan indikator tersedianya/tersusunnya pemetaan berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun capaian program penataan peraturan perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara sampai dengan Triwulan I adalah:

- ✓ Telah dilakukan inventarisasi Perda dan Raperda di kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara;
- ✓ Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Harmonisasi Perda) di kabupaten halamhera Tengah.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Pentaan dan Penguatan Orgaisasi dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap struktur, jenjang, duplikasi fungsi, pengelompokan tugas, duplikasi pelaporan, kinerja yang dihasilkan, kesesuaian mandat, tumpang-tindih fungsi instansi lain, dan kemampuan

adaptif terhadap lingkungan strategis. Hasil evaluasi akan dimanfaatkan untuk penataan organisasi agar ketepatan fungsi dan ukuran organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan. Beberapa masukan dari hasil evaluasi dan kajian telah dimanfaatkan untuk penyusunan analisis jabatan, pengukuran kinerja, perhitungan renumerasi kerja dan sebagainya. Capaian penguatan organisasi pada tahun 2019, sebagai berikut:

- ✓ Telah dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

  Evaluasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai evaluasi kelembagaan pemerintah. Hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal. Hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018

4. Penataan Tatalaksana.

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi.

Sasaran program penataan tata laksana yang akan dicapai adalah:

- ✓ Membangun proses penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP);
- ✓ Menerapkan manajemen kearsipan yang handal.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta kesejahteraan yang sepadan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan penyempurnaan siklus SDM mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan dan penghargaan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi

Sasaran program penataan system manajemen SDM yang akan dicapai adalah:

- ✓ Tersedianya dan diterapkannya sistem rekruitmen pegawai berbasis kompetensi yang transparan dan akuntabel.
- ✓ Tersedianya dokumen uraian jabatan untuk seluruh jabatan struktural dan non struktural yang ada dalam struktur organisasi.
- ✓ Tersedianya *Job Grading* yang sudah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB dan BKN untuk semua jabatan.
- ✓ Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan.
- ✓ Tersedianya peta profil kompetensi individu.
- ✓ Tersedianya sistem penilaian kinerja individu.
- ✓ Tersedianya database pegawai yang akurat.
- ✓ Sistem penerimaan CPNS telah menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) sejak tahun 2020.
- ✓ Pengembangan SKP elektronik melaui simpeg.

6. Penguatan Pengawasan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan serta pengelolaan keuangan yang handal dan terpercaya.

Sasaran program penguatan pengawasan yang akan dicapai adalah:

- ✓ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- ✓ Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- ✓ Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara;
- ✓ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Adapun capaian program penguatan pengawasan pada triwulan I secara rinci adalah sebagai berikut:

Gratifikasi :

a. Telah dilakukan *Public Campaign* tentang pengendalian gratifikasi.
b. Telah dilakukan pengendalian gratifkasi dan telah di implementasian.

Penetapan SPIP :

a. Telah dilaksanakan repat pemebentukan tim, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020 Kanwil Maluku Utara;
b. Telah dibangun lingkungan pengendalian;
c. Telah dilakukan penyusunan Manajemen resiko;
d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah didentifikasi.

Pengaduan Masyarakat :

Pengelolaan pengaduan masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 dimaksudkan agar pengaduan masyarakat dapat terselesaikan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Saluran pengaduan masyarakat yang masuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 melalui Aplikasi E-LAPOR yaitu nihil pada tahun 2020 sebagaimana Tabel.

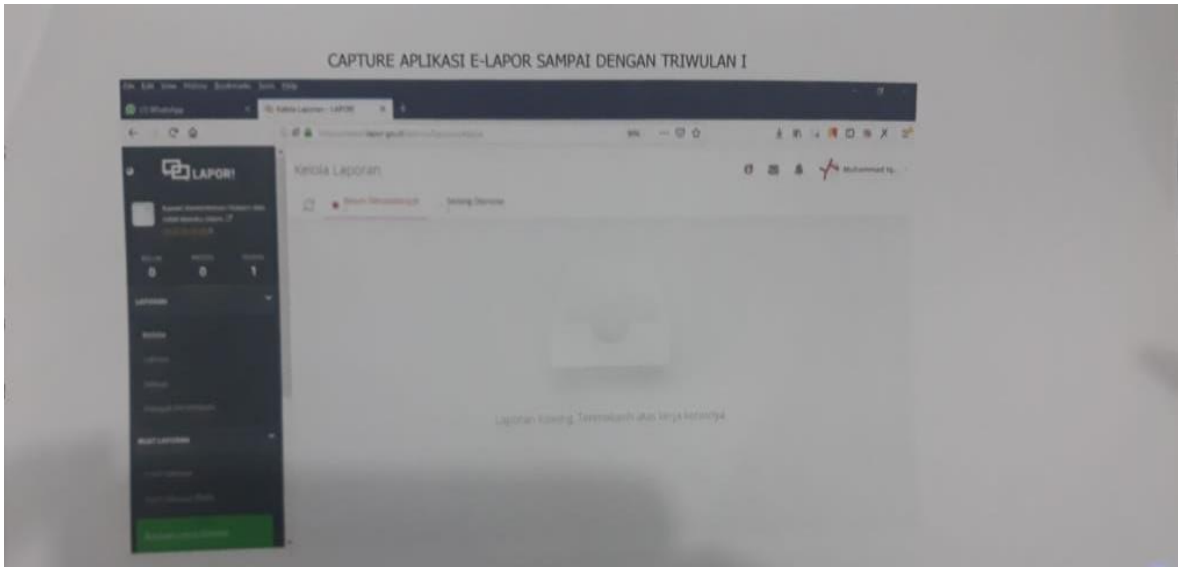

Whistle – Blowing System :

Capaian yang dihasilkan pada *Whistle Blowing System* adalah :

Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan *Whisleblower* dan Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara :

- ✓ Telah tersedianya alur Penanganan WBS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

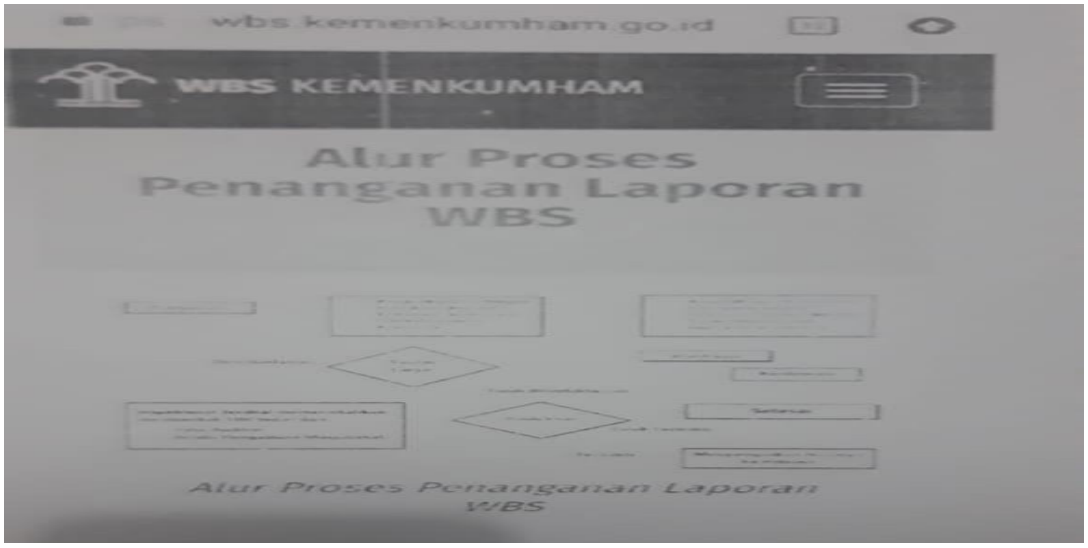

- ✓ Aplikasi *Whistle – Blowing System* sudah tersedia di *Website* Kementerian Hukum dan HAM seperti terlihat pada Gambar.

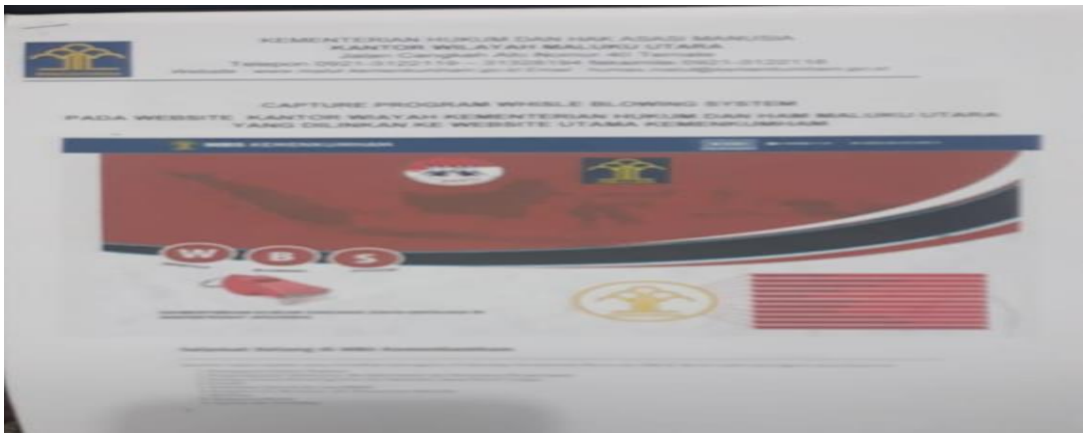

Penanganan Benturan Kepentingan :

- ✓ Capaian yang dihasilkan pada penanganan benturan kepentingan adalah:

  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penangnana Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian MENPA dan RB yang meliputi penanganan benturan kepentingan dan tindakan apabila ASN berada dalam situasi benturan kepentingan.

  Untuk pelaksanaan benturan Kepentingan pada triwulan I masih sebatas pembentukan Tim Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Upaya penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Capaian penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- ✓ Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusuanan perencanaan.
- ✓ Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja.
- ✓ Keterlibatan pimpinan dalam memantau secara langsung pencapaian kinerja secara berkala.
- ✓ Pengelolaan akutabilitas kinerja sudah memiliki dokumen perencanaan (rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja)
- ✓ Dokumen perencanaan telah memiliki IKU yang telah di tetapkan oleh Kantor Wilayah sesuai dengan karakteristik unit kerja;
- ✓ Seluruh unit kerja telah memiliki aplikasi SMART;
- ✓ Seluruh unit kerja telah memiliki aplikasi E-Performance;
- ✓ Seluruh unit kerja telah memiliki aplikasi E-Monev;
- ✓ Dan pelaksanaan melalui aplikasi Kinerja.

E-PERFORMANCE TRIWULAN I KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA TAHUN 2020

APLIKASI E-MONEV TRIWULAN I KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA TAHUN 2020

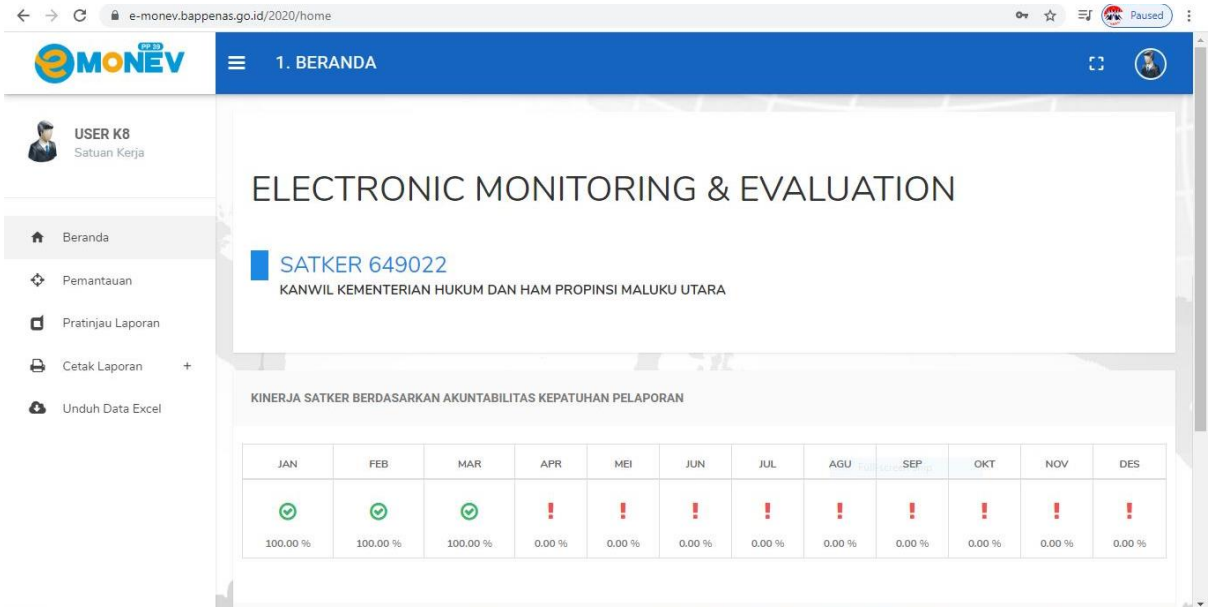

APLIKASI SMART TRIWULAN I KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA TAHUN 2020

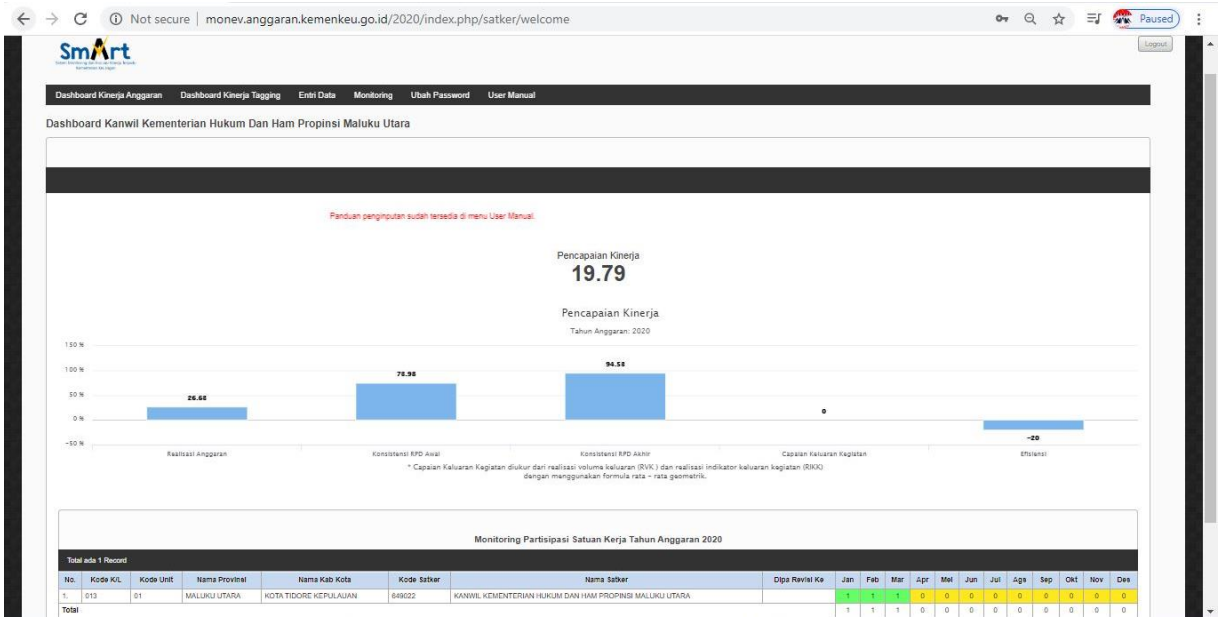

APLIKASI TARJA B03 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM MALUKU UTARA TAHUN 2020

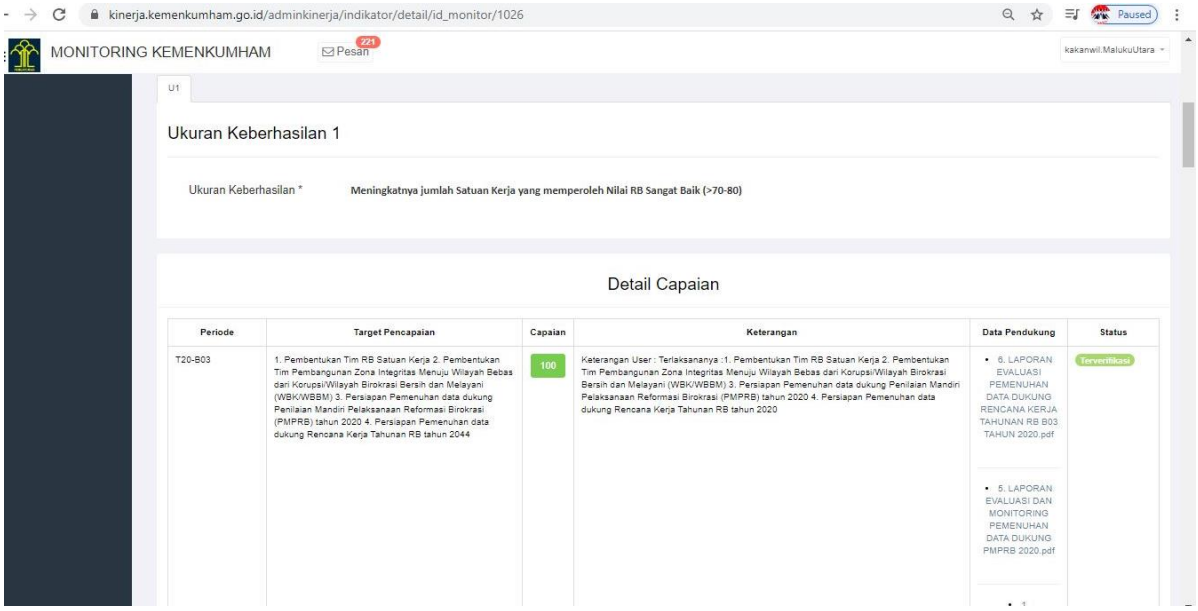

8. Peningkatan KualitasPelayanan Publik.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat (*stakeholder*). Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Maluku Utara, mewujudkan pelayanan publik melalui pelayanan perencanaan nasional yang melibatkan seluruh *stakeholder* (perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya), meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat (stakeholder).

Sasaran program peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dicapai adalah:

- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada pemangku kepentingan;
- ✓ Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan;
- ✓ Meningkatnya indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan.

Adapun capaian program peningkatan kualitas pelayanan publik). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sampai dengan triwulan I antara lain:

- ✓ Tersedia Website Kantor Wilayah
- ✓ Tersedia Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- ✓ Deklarasi Komitmen Bersama.
- ✓ Pelaksanaan Survei eksternal terkait pelayanan publik.

Adapun langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara antara lain:

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan.
b. Strandar pelayanan telah dimaklumatkan.
c. Terdaapt SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.
d. Informasi tentang pelayanan mudah dakses melalui berbagai media.
e. Telah terdapat sistem *punismenth* (sanksi) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasai keada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
f. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.

g. Terdapat Inovasi Layanan.

h. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan.

i. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diaksess secara terbuka.

j. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

C. Penutup

Upaya pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I Khusunya di Kantor Wilayah Maluku Utara terus dilaksankan sesuai dengan Program Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi

Ke depan, dalam upaya mewujudkan *good governance* di Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara, dibutuhkan ketetapan hati dan komitmen yang kuat dari semua jajaran pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara untuk terus menjalankan proses reformasi birokrasi melalui program-program yang sudah ditetapkan secara berkesinambungan. Harapan yang besar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara sesuai dengan harapan pemerintah secara umum adalah tercapainya kemerintahan kelas dunia (*world class governance*) melalui perbaikan semua lini dalam birokrasi.

Dibuat di : Ternate
Pada Tanggal : 25 Maret 2020
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi

Rifqi Adnan Kriswanto
Nip. 19720429 199803 1 001